



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**

**MENUJU ZONA INTEGRITAS  
WILAYAH BEBAS KORUPSI**

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

# **INSPEKTORAT**

## DAFTAR ISI

1. Simpeg
2. My SAPK
3. Aktivasi Akun MySAPK bagi para Pegawai Negeri Sipil
4. ND Edaran Aktivasi Akun MySAPK bagi PNS
5. SIBANGALAN
6. SIGAPP
7. SIKD
8. SE 7 TAHUN 2021 PERUBAHAN SE 8 TAHUN 2021 PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI
9. Absensi di Dashboard



ABSENSI ONLINE WORK FROM HOME/OFFICE

### Profil Pegawai

Cetak Riwayat Hidup

Data Utama	
NIP	199012272018012001
Nama	Amelia Desy Ratna Yuwita
TMT Awal	01-01-2018
Kedudukan Hukum	Aktif
Pangkat/Golongan	Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan	Auditor Pertama
Jenis Jabatan	Fungsional Tertentu
Unit Kerja	Inspektorat
No. Kartu Pegawai	<a href="#">Edit</a>
No. KTP	3577036712900002 <a href="#">Edit</a>
Jenis Kelamin	Wanita
Agama	Islam <a href="#">Edit</a>
Status Kawin	Belum Kawin <a href="#">Edit</a>
Golongan Darah	B <a href="#">Edit</a>



Ganti Foto

### Data Jabatan dan Unit Kerja

Jabatan	Auditor Pertama
Unit Kerja	Inspektorat

### Data Atasan Langsung

Pit. Inspektur



Teguh Wahyudi

**MUHAMMAD RIZKI**

198610172018011001

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI



Profile Saya



Dokumen Saya



Kompetensi



Performa

**Yang terbaru dari MySAPK****Pemutakhiran Data Mandiri**

Lengkapi data mandiri anda untuk melanjutkan menggunakan aplikasi MySAPK

Progres Anda

12 dari 12



Periode Pemutakhiran Data Mandiri

**15-July-2021 - 01-December-2021**

Terima kasih, Kegiatan PDM sudah berakhir

**Lanjutkan****Layanan MySAPK**

Fitur dan layanan penunjang data PNS



Home



Update Data



Notifikasi



Akun



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1296/KP.09/06/2021  
Lampiran : satu berkas  
Hal : **Aktivasi Akun MySAPK Aparatur Sipil Negara**

21 Juni 2021

Kepada Yth.

**Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**

di

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 1 ayat (1): "Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk", serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021 Lampiran I nomor (2): "Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh *user* admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021".

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data mandiri maka diharapkan kepada para pegawai ASN untuk dapat melakukan aktivasi MySAPK selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2021 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengakses MySAPK menggunakan *handphone* masing-masing melalui <https://pdm-asn.bkn.go.id>. Untuk pengguna *android* mengklik tombol "Download MySAPK", sedangkan pengguna *iOS* mengklik tombol "MySAPK web";
2. Klik tombol "lupa password";
3. Isikan NIP dan *email* yang terdaftar di LHKPN. Sistem akan mengirimkan kode *token* ke *email*;
4. Buat *password* baru dan masukkan ke kolom *password*, kemudian masukkan kode *token*;
5. Jika isian benar, maka *user* dapat *login* di MySAPK dengan *password* baru.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
dan Organisasi,  
**Teguh Wahyudi**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1303491814210616025717



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS**

**NOMOR 522/2200/KP.09/06/2021**

Yth : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Hal : Penyampaian Edaran Aktivasi Akun MySAPK bagi para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Tanggal : 17 Juni 2021

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021, dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Instansi Pusat melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) dan MySAPK yang telah diselenggarakan pada Kamis, 27 Mei 2021 di Hotel Fairmont; bahwa para pegawai ASN wajib melakukan aktivasi MySAPK melalui laman <https://pdm-asn.bkn.go.id> sampai dengan akhir minggu terakhir bulan Juni 2021.

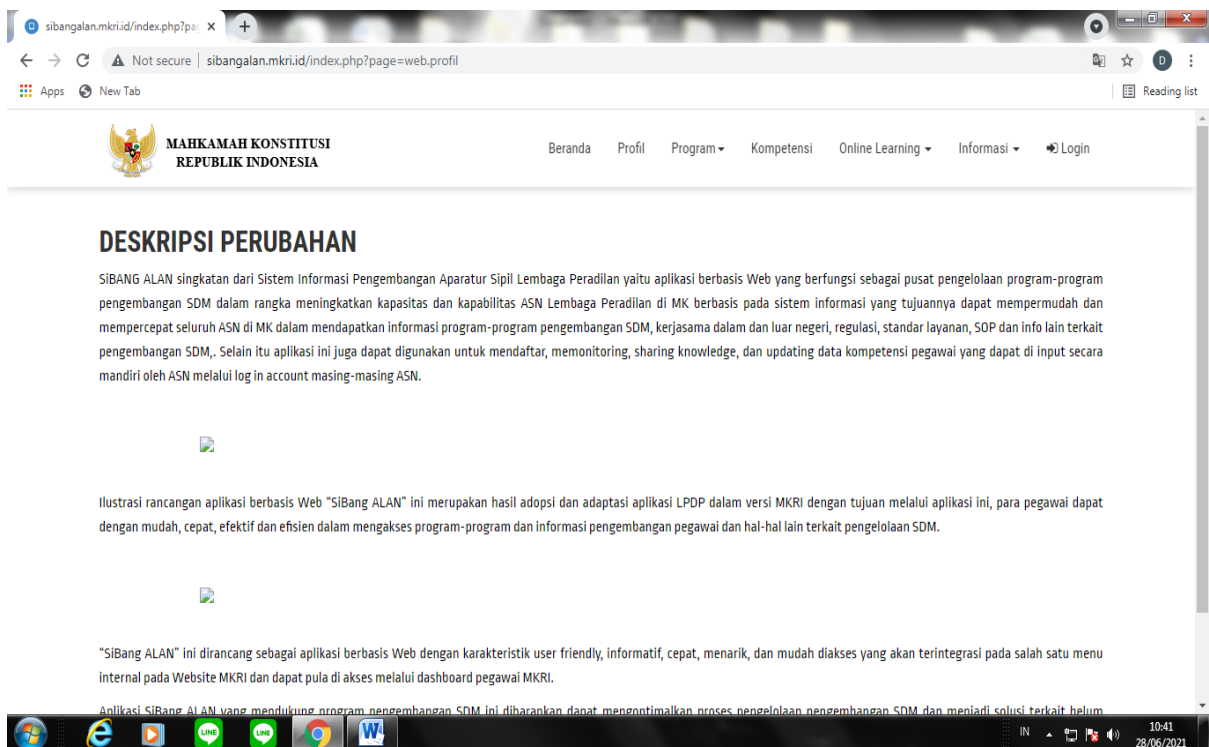
Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diwajibkan untuk turut serta dalam Program Satu Data Indonesia dengan melakukan pemutakhiran data mandiri para ASN melalui aplikasi MySAPK tahap pertama, yaitu aktivasi MySAPK pada *handphone* masing-masing pegawai sampai dengan akhir bulan Juni 2021. Dikarenakan di Mahkamah Konstitusi tidak terdapat pegawai PPPK dan PPT Non ASN, maka yang berpartisipasi hanya pegawai PNS. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan konsep surat edaran aktivasi MySAPK bagi para PNS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
dan Organisasi,  
Teguh Wahyudi**



*Digital Signature*  
mk1303491814210616025611







GAJI INDUK



TUNKIN



HDPP



LEMBUR



MAKAN



PENDAPATAN LAIN

### Profil Pegawai

**NAMA** : AMELIA DESY RATNA YUWITA,S.A.  
**NIP** : 199012272018012001  
**REKENING** : 058001022666507

**TOTAL** : Rp. 20.786.500  
**RATA - RATA** : Rp. 2.969.500

### Data Gaji

Tahun :

NO	JENIS GAJI	BULAN	TANGGAL INPUT GAJI	JUMLAH	UNDUH DOKUMEN
1	Gaji Induk	Januari 2022	2021-11-24	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>
2	Gaji Induk	Februari 2022	2022-01-04	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>
3	Gaji Induk	Maret 2022	2022-02-03	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>
4	Tunjangan Hari Raya	April 2022	2022-04-18	Rp. 3.267.000	<a href="#">view PDF</a>
5	Gaji Induk	April 2022	2022-03-10	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>
6	Gaji Induk	Mei 2022	2022-04-05	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>
7	Gaji Induk	Juni 2022	2022-05-09	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>
8	Gaji Induk	Juli 2022	2022-06-08	Rp. 2.969.500	<a href="#">view PDF</a>



## Halaman Utama

Selamat Datang **Amelia Desy Ratna Y**  
Auditor Pertama (Amelia Desy Ratna Y)  
[Ubah Kata Sandi](#)

## Surat Dinas

- Peraturan MK
- Peraturan Ketua MK
- Keputusan Ketua MK
- Protap Ketua MK
- Instruksi Ketua MK
- Surat Edaran Ketua MK
- Peraturan Sekjen MK
- Keputusan Sekjen MK
- Instruksi Sekjen MK
- Protap Sekjen MK
- Surat Edaran Sekjen MK

## 0 Agenda Rapat

## Response Time

- Respon Unit Kerja

## Tutorial

- Tutorial Aktivasi User Pendaftaran Digital Signature BSrE
- Tutorial Set Passphrase User Pendaftaran Digital Signature BSrE
- Tutorial Multiple DS

## Top 10 Talent Pool



No	Nama	NBV	Box	Kuadran
1	Yohana Citra Permatasari	78.69	7	III
2	Wiryanto	77.77	7	II
3	Sigit Purnomo	76.2	7	II
4	Tatang Garjito	75.86	7	II
5	Andi Hakim	75.7	7	III
6	Heru Setiawan	75.41	7	II
7	Ida Ria Tambunan	74.46	7	II
8	Johan Yustisianto	74.36	7	II
9	Nanda Adytiansyah	73.81	7	II
10	Tatang Garjito	73.69	7	II

## User Online

Senin, 20 Juni 2022, Jam 15:15:03

## Riwayat Surat Dibaca Selama 7 Hari

Tampilkan  data Pencarian :

No.	Tgl.Dibaca	Pengirim	Perihal	Jenis Surat	Kecepatan Respon
1	2022-06-20 08:04:00	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Permohonan Penyampaian Nota Dinas Permintaan Self Assessment LKE ZI Unit Kerja kepada Tim Penilai Internal/Inspektorat	Teruskan	0 Hari 0 Jam 0 Menit
2	2022-06-18 15:21:30	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Permintaan Self Assessment LKE ZI Unit Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Teruskan	0 Hari 0 Jam 1 Menit
3	2022-06-17 19:34:19	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Permohonan Penyampaian Nota Dinas Permintaan Self Assessment LKE ZI Unit Kerja kepada Tim Penilai Internal/Inspektorat	Teruskan	0 Hari 0 Jam 4 Menit
4	2022-06-17 09:21:41	Inspektur	ST Reviu Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun Anggaran 2022	Disposisi	0 Hari 0 Jam 11 Menit
5	2022-06-16 15:21:59	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Permintaan Data Dalam Rangka Reviu PAPBJ Triwulan II 2022	Nota Dinas	0 Hari 0 Jam 1 Menit
6	2022-06-16 15:21:54	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Permintaan Data Dalam Rangka Reviu PAPBJ Triwulan II 2022	Nota Dinas	0 Hari 0 Jam 4 Menit
7	2022-06-15 13:53:05	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Direktur CV Pratama Sakti Internusa - Peringatan dan Penagihan Tunggakan Piutang atas Temuan BPK pada Pekerjaan TA 2020	Teruskan	0 Hari 0 Jam 1 Menit
8	2022-06-15 13:49:56	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Laporan Kerusakan Notebook/Laptop Macbook Air	Teruskan	0 Hari 0 Jam 1 Menit
9	2022-06-15 13:49:51	Auditor Pertama (Muhammad Rizki)	Penyampaian Konsep SK Tugas Belajar Beasiswa MK-Stuned TA 2022	Teruskan	0 Hari 0 Jam 0 Menit
10	2022-06-15 13:29:34	Auditor Muda (Dhita Cantika Megatania)	Penyampaian Konsep SK Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2022	Teruskan	0 Hari 0 Jam 7 Menit

Menampilkan 1 sampai 10 dari 12 data

Awal [Kembali](#) [1](#) [2](#) [Lanjut](#) [Akhir](#)

### Petunjuk Umum:

Menu Registrasi Surat untuk melakukan Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar  
Menu Surat Masuk untuk melihat Surat Masuk  
Menu Log Surat Keluar untuk melihat Surat Keluar pernah Anda buat sebelumnya  
Menu Berkas untuk melihat Berkas Unit Kerja (sebagai Administrator Unit) serta Notifikasi Berkas Aktif

Klik tab [Pengaturan Unit Kerja & Pengguna](#) untuk melihat Unit Kerja dan Pengguna Aplikasi  
Klik tab [Pengaturan Umum](#) untuk melihat Komponen Pengaturan Umum Aplikasi  
Klik tab [Pengaturan Klasifikasi & Berkas](#) untuk melihat dan mengatur Klasifikasi dan Berkas  
Klik tab [Laporan](#) untuk memilih dan menampilkan Laporan





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada YM/Yth.:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi;
2. Ketua dan Anggota Dewan Etik;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Pegawai Kontrak di lingkungan Mahkamah Konstitusi

## SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2021

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### A. Umum

Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam surat tugas pegawai, perlu mengatur kembali penetapan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai dengan tujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman yang jelas tentang pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
2. Menghindari penyalahgunaan wewenang pejabat penandatanganan surat tugas pegawai dan meningkatkan akuntabilitas lembaga;
3. Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengarsipan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

#### C. Ruang Lingkup

Dalam Surat Edaran ini hanya mengatur pelaksanaan penetapan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Isi Edaran**

1. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola arsip yang baik, perlu mengatur kewenangan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
2. Surat tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibuat pejabat/staf terkait secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan ditandatangani secara digital oleh pejabat yang berwenang;
3. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas pegawai adalah pejabat setingkat eselon I dan eselon II;
4. Surat tugas pegawai yang melibatkan eselon I/setara eselon I dan/atau eselon II/setara eselon II dan/atau eselon III/setara eselon III dan/atau eselon IV/setara eselon IV, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum yang melibatkan lebih dari 1 (satu) unit kerja, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir (4) dan (5) tidak dapat dipisah dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
7. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum pada unit kerja tertentu ditandatangani secara digital oleh pejabat eselon II pada unit kerja yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan/disposisi dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Penomoran surat tugas pegawai diberi nomor sesuai dengan klasifikasi tata naskah dinas yang telah diatur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 April 2021  
Sekretaris Jenderal  
**M. Guntur Hamzah**





- [Absensi Online](#)
- [Health Monitoring](#)
- [Monitoring](#)
- [Absen](#)
- [Peta Sebaran](#)
- [Panduan Absensi](#)
- [Lokasi Saya](#)
- [Jadwal Saya](#)
- [Info Perangkat](#)
- [Log Absensi](#)
- [Error Logs](#)

## Absensi Online

### WFH/WFO

Senin, 20 Juni 2022

NIP : 199012272018012001

NAMA : Amelia Desy Ratna Yuwita

Hari ini

📱 **WFO**

**Mulai/Masuk:** 07:18 WIB 📍 📷

**Selesai/Pulang:**

**Suhu tubuh:** 36 °C

🏠 Absen Pulang

📅 Aktivitas WFH/WFO/Tugas Dinas

📄 Pengisian Formulir Health Monitoring

Bulan Juni

Tahun 2022

Simpan
Cetak
Lihat Pdf

Tampilkan semua hari 1/2

No.	Tanggal	Mulai	Lokasi Mulai	Jumlah Jam Kerja	Keterangan	SKP Kegiatan
		Selesai	Lokasi Selesai			
1.	20-06-2022 Senin 📱 WFO	📍 07:18:19 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta			Tidak ada data. <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Isi SKP</span>
2.	17-06-2022 Jum'at 📱 WFO	📍 07:20:48 WIB 📍 16:01:45 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 41 menit		Tidak ada data.
3.	16-06-2022 Kamis 📱 WFO	📍 07:03:05 WIB 📍 16:01:45 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 58 menit		Tidak ada data.
4.	15-06-2022 Rabu 📱 WFO	📍 07:19:01 WIB 📍 16:01:58 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 42 menit		Tidak ada data.
5.	14-06-2022 Selasa 📱 WFO	📍 07:10:03 WIB 📍 16:04:00 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 54 menit		Tidak ada data.
6.	13-06-2022 Senin 📱 WFO	📍 07:23:32 WIB 📍 16:02:10 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 39 menit		Tidak ada data.
7.	10-06-2022 Jum'at 📱 WFO	📍 07:05:38 WIB 📍 16:02:04 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 57 menit		Tidak ada data.
8.	09-06-2022 Kamis 📱 WFO	📍 07:24:05 WIB 📍 16:01:15 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 37 menit		Tidak ada data.
9.	08-06-2022 Rabu 📱 WFO	📍 07:07:11 WIB 📍 16:05:33 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 58 menit		Tidak ada data.
10.	07-06-2022 Selasa 📱 WFO	📍 07:11:27 WIB 📍 16:01:16 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 50 menit		Tidak ada data.
11.	06-06-2022 Senin 📱 WFO	📍 07:23:03 WIB 📍 16:02:22 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 39 menit		Tidak ada data.
12.	03-06-2022 Jum'at 📱 WFO	📍 07:18:59 WIB 📍 16:05:01 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 47 menit		Tidak ada data.
13.	02-06-2022 Kamis 📱 WFO	📍 07:27:14 WIB 📍 16:01:35 WIB	Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta Kota Jakarta Pusat, D.K.I. Jakarta	8 jam 34 menit		Tidak ada data.
<b>Total jam kerja:</b>				105.3 jam		
<b>Rata-rata jam kerja per minggu / hari:</b>				52.6 / 8.8 jam		
<b>Rata-rata jam kerja 1 tahun ini</b>						
<b>Total hari kerja:</b>				97 hari		
<b>Total jam kerja:</b>				802,8 jam		
<b>Rata-rata jam kerja per minggu / hari:</b>				41.4 / 8.3 jam		

📍 Lihat data sebaran

